

**LAPORAN PENILAIAN RISIKO TAHUN 2025
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN DEKET**

Jalan Raya Deket Nomor 14 - Kode Pos 62291
Telp. 0322-322231 e-mail : kec.deket@lamongankab.go.id
website : www.lamongankab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penilaian Risiko Tahun 2025 Kantor Kecamatan Deket.

Penerapan SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mensyaratkan terbangunnya infrastruktur disetiap unsurnya, salah satu unsur yang harus dibangun adalah daftar risiko (risk register) ditingkat entitas dan kegiatan sebagai penyempurnaan pengendalian yang masih lemah.

Laporan Penilaian Risiko Tahun 2025 ini sebagai persyaratan yang sangat penting bagi peningkatan mutu dan pelaksanaan kinerja Kantor Kecamatan Deket. Harapannya, laporan ini bisa menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja seluruh pegawai Kantor Kecamatan Deket.

Akhir kata semoga buku laporan penilaian risiko Tahun 2025 ini bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kantor Kecamatan Deket.



SIWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M
Pembina
NIP. 19851010 200602 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah organisasi mempunyai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi misinya. Dalam pencapaian tujuan organisasi terdapat banyak kemungkinan yang terjadi yang dapat mengakibatkan tujuan tidak dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Risiko dapat disebabkan faktor dari luar maupun faktor dari dalam yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Setiap bagian dalam organisasi memiliki risikonya tersendiri. Contohnya potensi risiko yang akan terjadi dalam organisasi pemerintah seperti risiko terjadi korupsi/kecurangan yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, penurunan pendapatan pajak, kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/pembangunan, kegagalan pemberian layanan yang optimal kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, organisasi pemerintah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijabarkan di dalam sasaran strategis yang harus dicapai. Dalam merealisasikan sasaran strategis untuk mencapai target kinerja utama yang sudah ditetapkan tersebut ada kemungkinan gagal atau tidak dapat dicapai sesuai rencana. Hal ini disebabkan adanya potensi risiko yang terjadi, sehingga perlu penerapan manajemen risiko untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dan berdampak pada sasaran strategis yang ingin dicapai.

Implementasi penilaian risiko pada Kantor Kecamatan Deket dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya bagian ketiga pasal 13, disebutkan bahwa penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Salah satu unsur SPIP mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko (*risk assessment*) dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Upaya tersebut tidaklah mudah dan perlu adanya kontribusi dari semua unsur yang ada di Kantor Kecamatan Deket pada setiap level untuk menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik. Disamping itu, setiap aktivitas yang dilakukan tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Deket jika tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, upaya implementasi manajemen risiko di lingkungan Kantor Kecamatan Deket perlu dikembangkan lebih lanjut.

B. Maksud dan Tujuan

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya.

Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit PemilikTingkat Eselon IV dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
- b. Memberikan gambaran profil risiko;
- c. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja;
- d. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- e. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- f. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- g. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- h. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

C. Ruang Lingkup

Kegiatan penilaian risiko pada Kecamatan Deket dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;

- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

Ruang lingkup penilaian risiko adalah penilaian risiko tribulan IV, Juli – September, atas peran Kantor Kecamatan Deket sebagai unsur penting dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Lamongan. Penilaian risiko (*risk assessment*) difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Deket

BAB II

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Lingkungan pengendali adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar sistem pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif.

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan system pengendalian intern yaitu :

1. Penegakan integritas dan nilai etika
2. Komitmen terhadap kompetensi
3. Kepemimpinan yang kondusif
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
5. Pedelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan

Sumber Daya Manusia.

7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset Negara, dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, terdapat 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern yang

dijadikan indikator pencapaian tujuan tersebut di atas yaitu:

1. Control Environment (Lingkungan Pengendalian)
2. Risk Assessment (Penilaian Resiko)
3. Control Activities (Kegiatan Pengendalian)
4. Information & Communication (Informasi dan Komunikasi)
5. Monitoring (Pemantauan)

BAB IV

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. Penetapan Konteks / Tujuan

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Deket berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), termasuk pada target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif.

Pada RPJMD Kabupaten Lamongan memiliki tujuan “**menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi**”. Dengan berpedoman pada tujuan RPJMD Kabupaten Lamongan tersebut maka tujuan Kecamatan Deket antara lain :

1. Meningkatkan pelayanan publik;
2. Meningkatkan kemandirian desa.

Dengan indikator tujuan antara lain :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Jumlah desa mandiri.

Penetapan konteks dilakukan meliputi penentuan unit pemilik resiko, sasaran yang akan dikelola resikonya, horizon waktu resiko yang akan dikelola dan penerapan kriteria untuk menganalisa resiko dan evaluasi resiko. Adapun sasaran yang dikelola risikonya sesuai dengan rencana strategis 2021 - 2026 meliputi :

1. Meningkatkan manajemen internal Perangkat Daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Deket ;
3. Meningkatkan pemberdayaan desa dan masyarakat.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan dengan cara mengkaji dan mendata kemungkinan- kemungkinan atau kejadian- kejadian yang berpotensi menghambat atau menggagalkan pencapaian tujuan pelaksanaan setiap kegiatan utama.

Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional Kecamatan Deket

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD	: Kecamatan Deket
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: 2025
Tujuan Strategis	: Mengoptimalkan Reformasi dan Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa
Sasaran strategis OPD	: Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah, Meningkatkan Pemberdayaan Desa
Urusan Pemerintahan	: Lainnya
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Deket

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disiplin Aparatur	Pelaksanaan	Persentase kehadiran Pegawai yang tepat waktu di aplikasi siapman rendah.	ROO.25.99.62.01	Subbag Umum dan Kepegawaian	Masih ada pegawai yang belum melakukan absensi Finger check lock secara tertib setiap hari sesuai dengan jam masuk kerja	Internal	C	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan kurang Maksimal	Kecamatan Deket
2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Pertanggungjawaban	Peralatan kantor rusak / tidak terawat	ROO.25.99.62.02	Subbag Umum dan Kepegawaian	kurangnya pertanggungjawaban pegawai dalam pemeliharaan peralatan kantor	Internal	C	Penggunaan barang kurang maksimal	Kecamatan Deket
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	Pelaksanaan	Kelengkapan data pendukung perencanaan dan evaluasi belum lengkap	ROO.25.99.62.03	Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Kurang ketelitian pegawai	Internal	C	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan kurang Maksimal	Kecamatan Deket

Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Kecamatan Deket

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD	: Kecamatan Deket
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: 2025
Tujuan Strategis	: Mengoptimalkan Reformasi dan Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa
Urusan Pemerintahan	: Lainnya
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Deket

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang tepat waktu	Pelayanan E-KTP, KK dan dokumen lainnya terlambat dan belum sesuai dengan Standar Pelayanan	RSO.25.99.62.01	Seksi Pelayanan Publik	1. Server, Jaringan IT Lokal / Nasional Terbatas	Eksternal & Internal	C	1. Terhambatnya proses pelayanan masyarakat	Masyarakat
						2. Listrik padam sewaktu waktu			2. Berkurangnya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan	
						3. Masa usia peralatan yang sudah tua			3. Mesin cetak E-KTP sering macet / Rusak	
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Desa yang melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat	Berkurangnya Rasa Gotong Royong di Masyarakat dan Kepemudaan	RSO.25.99.62.02	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Minimnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kepemudaan	Eksternal & Internal	C	1. Munculnya sifat egois sehingga lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri daripada kepentingan banyak orang	Masyarakat dan Kecamatan Deket

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD	: Kecamatan Deket
Tahun Penilaian	2025
Periode yang dinilai	2025
Tujuan Strategis	: Mengoptimisasi Reformasi dan Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa
Urusan Pemerintahan	: Lainnya
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Deket

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
						2. Modernisasi, globalisasi, dan Bersikap Individu			2. Kurangnya kemampuan dalam bekerja sama sebagai sebuah kelompok	
									3. Pudarnya rasa solidaritas antar sesama individu.	
			Kekeringan	RSO.25.99.62.03	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kurangnya sumber air dan embung-embung mengalami pendangkalan	Eksternal & Internal	C	Konsumsi air di masyarakat tidak terpenuhi	Masyarakat dan Kecamatan Deket
		Persentase Desa Naik Kelas	Terlambatnya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan data-data yang diperlukan	RSO.25.99.62.04	Seksi Pemerintahan	Masih kurang tertibnya perangkat desa membuat laporan	Eksternal & Internal	C	Terlambatnya laporan kecamatan ke Dinas Terkait (Dinas PMD Kabupaten Lamongan)	Kecamatan Deket
			Kurang disiplinnya Kades dan Perangkat Desa	RSO.25.99.62.05	Seksi Pemerintahan	1. Kurang kesadaran akan pentingnya disiplin	Eksternal & Internal	C	Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan masyarakat terganggu	Masyarakat dan Kecamatan Deket
						2. Kurang pengawasan dan pembinaan				

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD	: Kecamatan Deket
Tahun Penilaian	2025
Periode yang dinilai	2025
Tujuan Strategis	: Mengoptimisasi Reformasi dan Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa
Urusan Pemerintahan	: Lainnya
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Deket

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
						3. Kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran				
		Konflik yang tertangani	Keamanan Lingkungan Kurang	RSO.25.99.62.06	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah SDM Linmas kurang memadai dan besaran insentifnya masih rendah	Eksternal & Internal	C	Desa akan kesulitan dalam antisipasi dan penanganan, jika terjadi konflik sosial	Masyarakat dan Kecamatan Deket
			Terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	RSO.25.99.62.07	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Adanya pelaksanaan kegiatan masyarakat yang tidak berizin 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman wilayah	Eksternal	C	1. Terganggunya keamanan dan kenyamanan masyarakat 2. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan terhambat	Masyarakat dan Kecamatan Deket

C. Hasil Analisis Risiko

Analisis risiko dilakukan dengan cara menentukan tingkat kemungkinan suatu risiko dan tingkat dampak suatu risiko dengan memperhatikan penanganan risiko yang sudah diidentifikasi serta Rencana tindak pengendalian risiko (RTP) sebagaimana tabel berikut ini :

Resiko Strategis Kantor Kecamatan Deket

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Sisa Risiko
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
Resiko Strategis OPD										
1	Penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat waktu	Pelayanan E-KTP, KK, dan dokumen lainnya terlambat dan belum sesuai dengan SPM	RSO .24.99.62.01	CAMAT	Server, jaringan IT local/nasional terbatasListrik padam sewaktu-waktu Masa usia peralatan yang sudah tua.	Internal dan Eksternal	C	Terhambat nya proses pelayanan masyarakat Berkurangn ya kepuasan masyarakat Mesin cetak E-KTP sering macet/rusa k	Masyarakat	Nilai IKM tidak maksimal

2	Desa yang melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat	Masyarakat dan kepemudaan kurang berkembang	RSO.24.99.62.02	CAMAT	Minimnya kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kepemudaan	Internal dan Eksternal	C	Desa Mandiri sulit dibentuk	Desa/ Masyarakat dan Kecamatan Deket	Indeks Desa Membangun tidak mengalami kenaikan
3	Desa naik kelas	Terlambatnya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan data-data yang diperlukan	RSO.24.99.62.03	CAMAT	Masih kurang tertibnya perangkat desa membuat laporan	Internal	C	Desa Mandiri sulit dibentuk	Kecamatan Deket	Indeks Desa Membangun tidak mengalami kenaikan
4	Konflik yang tertangani	Keamanan lingkungan kurang	RSO.24.99.62.04	CAMAT	Jumlah SDM linmas kurang memadai dan besaran insentifnya masih rendah	Internal dan Eksternal	C	Desa akan kesulitan dalam antisipasi dan penanganan jika terjadi konflik sosial	Masyarakat dan Kecamatan Deket	Konflik yang tertangani kurang maksimal

Risiko Operasional Kantor Kecamatan Deket

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak		Sisa Risiko
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	terlaksana	"Resiko Operasional : Terjadinya keterlambatan dalam proses koordinasi antara kecamatan, desa, dan lembaga pendukung"	RSO.24.99.40.02	Kecamatan Deket	Respons lambat akibat beban kerja tinggi dan kurangnya prioritas.	INTERNAL	UC	Penyusunan rencana pemberdayaan desa tertunda.	Kecamatan, Pemerintah Desa, Pendamping Desa, Masyarakat	
2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	terlaksana	"Resiko Operasional : Partisipasi warga rendah dalam kegiatan PKK."	RSO.24.99.40.03	Kecamatan Deket	Sosialisasi kegiatan tidak efektif.	INTERNAL	UC	Kurangnya media komunikasi terstruktur.	Kegiatan tidak optimal dan target tidak tercapai.	
3	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	terlaksana	"Resiko Operasional : Keterlambatan penyampaian informasi dan koordinasi antar-instansi menyebabkan respons lambat terhadap gangguan ketertiban umum."	RSO.24.99.40.04	Kecamatan Deket	"Mekanisme pelaporan manual Minimnya sarana komunikasi terpadu Tidak adanya jadwal koordinasi yang baku Keterbatasan kehadiran pada rapat koordinasi"	INTERNAL	UC	"Gangguan ketertiban tidak tertangani cepat Potensi konflik meningkat Penilaian negatif dari masyarakat terkait kualitas pelayanan publik"	Masyarakat, Kecamatan, Polsek, Satpol PP, Pemerintah Daerah	

4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	terlaksana	"Resiko Operasional : Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tidak sepenuhnya sesuai dengan penugasan Kepala Daerah."	RSO.24 .99.40.05	Kecamatan Deket	"Keterbatasan jumlah aparat kecamatan yang menangani pembinaan desa. Jadwal pembinaan belum tersusun secara rinci dan terukur. Prioritas kegiatan lain menyebabkan pembinaan desa tertunda."	INTERNAL	UC	"Tidak seluruh desa memperoleh pembinaan dan rekomendasi yang dibutuhkan. Kesalahan administrasi pemerintahan desa berpotensi berulang. Capaian kinerja kegiatan pembinaan dan pengawasan tidak optimal."	Masyarakat, Pemerintah Daerah, Aparatur Pelaksana.
5	"Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa"	Jumlah Dokumen yang difasilitasi	terlaksana	"Resiko Operasional : Kecamatan merencanakan pembinaan dan pengawasan ke seluruh desa terkait administrasi pemerintahan desa. Namun dalam pelaksanaannya, hanya sebagian desa yang difasilitasi karena keterbatasan waktu dan	RSO.24 .99.40.06	Kecamatan Deket	Beban kerja tinggi, kurangnya monitoring dokumen masuk-keluar, dan lemahnya sistem pengingat.	INTERNAL	UC	Penundaan layanan pemerintahan desa, potensi ketidaksesuaian regulasi, dan gangguan jadwal pembangunan desa.	Desa, Kecamatan, dan masyarakat penerima manfaat.

				jumlah aparatur."								
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	terlaksana	"Resiko Operasional : Keterlambatan penyusunan RKPD dan RENJA perangkat daerah."	RSO.24 .99.40.07	Kasubag Perencanaan, evaluasi dan keuangan	Kurangnya koordinasi dan ketidaklengkapan data pendukung dari unit kerja.	INTERNAL	UC	Jadwal penyusunan dokumen terganggu, kualitas dokumen menurun, dan potensi revisi anggaran meningkat.	OPD, TAPD	
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	terlaksana	"Resiko Operasional : Terlambatnya penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/tahunan."	RSO.24 .99.40.08	Kecamatan Deket	Beban kerja tinggi, keterlambatan penyampaian bukti belanja dari bidang/unit lain.	INTERNAL	UC	Keterlambatan pelaporan menyebabkan tidak terpenuhinya tenggat waktu regulasi dan berpotensi menimbulkan teguran/penilaian kinerja buruk.	Pimpinan perangkat daerah, bagian keuangan, pemerintah daerah.	
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	terlaksana	"Resiko Operasional : Pengajuan kenaikan pangkat beberapa pegawai terlambat diproses karena data kepegawaian tidak diperbarui secara berkala dan dokumen pendukung belum lengkap."	RSO.24 .99.40.09	Kecamatan Deket	"Pengelolaan data kepegawaian masih dilakukan secara manual atau belum terintegrasi. Beban kerja petugas kepegawaian tinggi Kurangnya pengecekan	INTERNAL	UC	"Hak pegawai (kenaikan pangkat/gaji berkala) tertunda. Keluhan pegawai meningkat. Kinerja dan motivasi pegawai menurun."	ASN di perangkat daerah	

							kelengkapan berkas sejak awal."					
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	terlaksana	"Resiko Operasional : Surat masuk dan keluar tidak tercatat secara lengkap dalam buku agenda atau aplikasi, sehingga beberapa surat tindak lanjut terlambat diproses."	RSO.24 .99.40.0 10	Kecamatan Deket	"Sistem administrasi persuratan masih dilakukan secara manual. Keterbatasan sumber daya petugas administrasi."	INTERNAL	UC	"Keterlambatan tindak lanjut surat dan kegiatan. Risiko kehilangan dokumen penting."	"Masyarakat Perangkat daerah lain Pimpinan instansi"	
11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	terlaksana	"Resiko Operasional : Pengadaan peralatan kantor yang direncanakan untuk menunjang pelayanan tidak dapat digunakan optimal karena spesifikasi barang yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan unit kerja."	RSO.24 .99.40.0 11	Kecamatan Deket	"Perencanaan kebutuhan barang tidak dilakukan secara detail. Penyusunan spesifikasi teknis kurang tepat."	INTERNAL	UC	"Barang tidak dimanfaatkan secara optimal. Pelaksanaan tugas dan pelayanan terganggu."	OPD pengguna barang, masyarakat penerima layanan.	

12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	terlaksana	"Resiko Operasional : Jasa kebersihan yang disediakan tidak mencakup seluruh area kantor sehingga kebersihan lingkungan kerja tidak terjaga secara optimal."	RSO.24 .99.40.0 12	Kecamatan Deket	Pengawasan pelaksanaan jasa kurang optimal.	INTERNAL	UC	Lingkungan kerja menjadi kurang nyaman.	OPD pengguna jasa dan masyarakat.
13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	terlaksana	"Resiko Operasional : Kerusakan aset daerah karena pemeliharaan tidak terlaksana tepat waktu atau tidak sesuai standar."	RSO.24 .99.40.0 13	Kecamatan Deket	Jadwal pemeliharaan tidak dipatuhi, kurangnya pengawasan, dan minimnya anggaran.	INTERNAL	UC	Menurunnya kualitas pelayanan, meningkatnya biaya perbaikan, dan gangguan operasional.	Pemerintah daerah, pegawai, dan masyarakat pengguna layanan.
14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	terlaksana	"Resiko Operasional : Kerusakan aset daerah karena pemeliharaan tidak terlaksana tepat waktu atau tidak sesuai standar."	RSO.24 .99.40.0 14	Kecamatan Deket	Jadwal pemeliharaan tidak dipatuhi, kurangnya pengawasan, dan minimnya anggaran.	INTERNAL	UC	Menurunnya kualitas pelayanan, meningkatnya biaya perbaikan, dan gangguan operasional.	Pemerintah daerah, pegawai, dan masyarakat pengguna layanan.

D. Pengendalian Yang Sudah Dilakukan

Hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di Kecamatan Deket sebagai langkah strategis dan bahan dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP. Adapun tabel kegiatan yang telah di laksanakan sebagaimana tabel berikut :

No	Resiko Prioritas	Kode resiko	Uraian Pengendalian Yang Sudah Ada	Celah Pengan dalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penang gung Jawab	Target Waktu Penyele saian
Risiko Strategis Kantor Kecamatan Deket :							
1	Penyelenggara an pelayanan publik yang tepat waktu	ROO.2 4.99.62 .01	Perbaikan kelistrikan, server, dan mesin cetak KTP di ruang pelayanan	Kurangnya kualitas pelayanan publik	Melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil terkait mesin cetak KTP dan meningkatkan kualitas petugas pelayanan	Camat	Januari s/d Desember 2025
2	Desa yang melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat	ROO.2 4.99.62 .02	Peningkatan intensitas pendampingan terhadap penyelenggara an pemerintahan desa	Kurangnya SDM perangkat desa	Pembinaan perangkat desa	Camat	Januari s/d Desember 2025
3	Desa naik kelas	ROO.2 4.99.62 .03	Peningkatan intensitas pendampingan terhadap penyelenggara an pemerintahan desa	Kurangnya SDM perangkat desa	Pembinaan perangkat desa	Camat	Januari s/d Desember 2025
4	Konflik yang tertangani	ROO.2 4.99.62 .04	Peningkatan penjagaan lingkungan	Kurangnya personil linmas yang memadai	Penunjukan Pejabat pelaksana Kasi Trantibum dan penambahan staf personil linmas	Camat	Januari s/d Desember 2025

Risiko Operasional Kantor Kecamatan Deket :							
1	Pengadministrasian Kepegawaian tidak tepat waktu dan kurang optimal	ROO.24.9 9.62.01	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Secara Berkala	Kurang tertibnya pengadministrasian	Pembinaan dan evaluasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Camat	Januari s/d Desember 2025
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan tidak tepat waktu	ROO.24.9 9.62.02	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Secara Berkala	Kurangnya personil/staf Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Pembinaan dan evaluasi Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Camat	Januari s/d Desember 2025
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tidak terlaksana	ROO.24.9 9.62.04	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Secara Berkala	Kurang tertib pengadministrasian	Pembinaan dan evaluasi	Camat	Januari s/d Desember 2025

D. Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing resiko dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing resiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengendalian yang masih dibutuhkan Kantor Kecamatan Deket dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
Risiko Strategis Kantor Kecamatan Deket :				
1	Penetapan target kinerja yang realistis, penyesuaian beban kerja SDM, penguatan dan evaluasi SOP pelayanan	Penetapan target kinerja yang realistis, penyesuaian beban kerja SDM, penguatan dan evaluasi SOP pelayanan	Camat	Januari - Desember 2025
2	Peningkatan kualitas pelayanan, percepatan waktu layanan, penanganan pengaduan masyarakat secara sistematis	Peningkatan kualitas pelayanan, percepatan waktu layanan, penanganan pengaduan masyarakat secara sistematis	Camat	Januari - Desember 2025
3	Peningkatan kualitas pelayanan, percepatan waktu layanan, penanganan pengaduan masyarakat secara sistematis	Peningkatan kualitas pelayanan, percepatan waktu layanan, penanganan pengaduan masyarakat secara sistematis	Camat	Januari - Desember 2025
Risiko Operasional Kantor Kecamatan Deket :				
1	Penggunaan sistem administrasi optimal	Penggunaan sistem administrasi belum optimal	Camat	Januari - Desember 2025
2	Data pelayanan terintegrasi antar unit	Data pelayanan tidak terintegrasi antar unit	Camat	Januari - Desember 2025
3	Dokumen masyarakat hilang atau rusak	Dokumen masyarakat hilang atau rusak	Camat	Januari - Desember 2025

BAB IV
RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pada bab ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak terlibat dalam pengendalian resiko serta keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
Risiko Strategis Kantor Kecamatan Deket :					
1	Melakukan Pembinaan Aparatur Kecamatan, Monitoring secara Berkala	Dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Rapat Koordinasi	Seluruh Aparatur Pegawai Kecamatan Deket	Januari - Desember 2025
2	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa secara Berkala	Rapat Koordinasi	Seluruh Aparatur Pegawai Desa/Kelurahan Kecamatan Deket	Januari - Desember 2025
Risiko Operasional Kantor Kecamatan Deket :					
1	Kurang tertibnya pengadministrasian	Dilaksanakan pembinaan berupa teguran baik secara lisan maupun tertulis	Rapat Koordinasi	Pegawai yang kurang disiplin / melakukan pelanggaran	Januar - Desember 2025
2	Kurangnya staf/personil Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Dilaksanakan pembinaan dan lembur guna penyelesaian tugas	Rapat Koordinasi	Pegawai yang di tunjuk	Januari-Desember 2025
3	Pembinaan dan Evaluasi	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Rapat Koordinasi	Seluruh Aparatur Pegawai Kecamatan Karanggeneng	Januari - Desember 2025

BAB V
RANCANGAN PEMANTAUAN

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa resiko dapat di pantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dan dilaksanakan dan berjalan efektif sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Deket :					
1	Melakukan Pembinaan Aparatur Kecamatan, Monitoring secara Berkala	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, bimtek, dll	Camat	Januari - Desember 2025	Juli - September 2025
2	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa secara Berkala	Camat	Januari - Desember 2025	Juli - September 2025
Risiko Operasional OPD Kecamatan Deket :					
1	Kurang tertibnya pengadministrasian	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025	Juli - September 2025
2	Kurangnya staf/personil Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025	Juli - September 2025
3	Pembinaan dan Evaluasi	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025	Juli - September 2025

BAB VI PENUTUP

Laporan penilaian resiko ini merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian risiko di Lingkungan Kantor Kecamatan Deket sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kantor Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan telah melakukan analisis manajemen risiko dari setiap kegiatan yang ada per triwulan. Berdasarkan hasil analisa manajemen risiko dari kegiatan yang ada di Kantor Kecamatan Deket terdapat kemungkinan risiko hampir/pasti terjadi minimal sekali setiap satu tahun dengan penilaian risiko dari sisi tingkat risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko yaitu dampak rendah dan sedang dimana tidak berdampak langsung pada pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara signifikan. Adapun potensi risiko terkait dengan dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan faktor kondisi keadaan masyarakat.

Laporan ini disusun dengan sebaik-baiknya, tetapi dengan keterbatasan pengetahuan dan pesatnya perkembangan dinamika masyarakat, kemajuan teknologi dan globalisasi memunculkan potensi-potensi risiko yang baru dari tahun ke tahun. Oleh karena itu penyusun menyadari masih banyak yang harus disempurnakan. Semoga laporan ini bermanfaat untuk kemajuan Kecamatan Deket.



SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M
Pembina
NIP. 19851010 200602 1 001

